



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 1431-1445

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Ni Komang Swari Anjani^{1✉}, Anak Agung Ketut Ayuningsasi²

Universitas Udayana

Email: swarianjani07@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali. Data yang digunakan yaitu menggunakan data panel dengan sembilan kabupaten/kota pada tahun 2013-2022 sehingga jumlah pengamatan adalah 90 pengamatan. Variabel yang diteliti dalam penelitian yaitu pajak daerah, dana perimbangan, belanja modal, kemandirian keuangan daerah, dan pertumbuhan ekonomi. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis jalur (path analysis) melalui data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Hasil analisis menyatakan bahwa, 1) pajak daerah, dana perimbangan, dan belanja modal berpengaruh secara langsung pada kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali, 2) pajak daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan kemandirian keuangan daerah berpengaruh secara langsung pada pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali, 3) pajak daerah, dana perimbangan, dan belanja modal berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Kata Kunci: *Pajak Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Kemandirian Keuangan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi.*

Abstract

This research aims to determine the factors that influence regional financial independence and economic growth in districts/cities of Bali Province. The data used is panel data with nine districts/cities in 2013-2022 so that the number of observations is 90 observations. The variables examined in the research are regional taxes, balancing funds, capital expenditure, regional financial independence and economic growth. The technique used to analyze the data is path analysis through secondary data sourced from the Central Statistics Agency. The results of the analysis state that 1) Regional taxes, balancing funds and capital expenditures have a direct influence on the financial independence of districts/cities in Bali Province, 2) Regional taxes, balancing funds, capital expenditures and regional financial independence have a direct influence on economic growth in districts/cities of Bali Province, 3) Regional taxes, balancing funds and capital expenditures indirectly influence economic growth through regional financial independence in districts/cities of Bali Province.

Keywords: Regional Taxes, Balance Funds, Capital Expenditure, Regional Financial Independence

PENDAHULUAN

Pemerintah menerapkan kebijakan otonomi daerah sebagai bentuk perubahan sistem pemerintahan yang sentralisasi. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan pemerintah dapat secara mandiri menggali potensi daerah untuk terwujudnya pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, daerah sudah seharusnya memiliki kemampuan kemandirian fiskal daerah. Untuk mencapai kemandirian fiskal didukung dengan penerimaan daerah berupa pendapatan asli daerah. Komponen-komponen yang membentuk pendapatan asli daerah yaitu pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Yulianti, 2000: 97). Kemandirian keuangan daerah tidak lepas dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena kemandirian keuangan daerah merupakan perbandingan antara pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah, sehingga apabila pendapatan asli daerah meningkat kemandirian keuangan daerah juga akan meningkat (Dewi dan Sutrisna, 2014).

Kemandirian keuangan daerah di Provinsi Bali pada tahun 2013-2022 mengalami fluktuasi. Pola hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait dengan rasio kemandirian keuangan daerah di Provinsi Bali berada pada pola hubungan partisipatif karena rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Bali berada pada interval 50 – 75 persen sebesar 59,31 persen. Artinya, peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat Provinsi Bali memiliki kemampuan keuangan yang sedang (50 – 75 persen) dalam melaksanakan otonomi daerah (Halim, 2007:168). Apabila rasio kemandirian keuangan daerah dikaji berdasarkan rasio pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, terdapat

daerah yang memiliki rasio kemandirian keuangan daerah sangat tinggi dan sangat rendah tiap tahunnya. Tiap tahunnya rasio kemandirian keuangan daerah didominasi oleh kabupaten/kota kawasan Sarbagita (kepanjangan dari Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan) yaitu mulai dari Kabupaten Badung dengan rata-rata 76,51 persen, Kota Denpasar 43,47 persen, Kabupaten Gianyar 30,60 persen, kecuali Kabupaten Tabanan hanya sebesar 19,96 persen. Namun, di sisi lain kabupaten/kota yang berada di kawasan non Sarbagita yaitu Kabupaten Jembrana, Klungkung, Bangli, Karangasem, dan Buleleng memiliki rasio kemandirian keuangan dalam kategori rendah sekali dan pola hubungan instruktif karena rasio kemandirian keuangan daerah masing-masing kabupaten/kota tersebut pada interval 0-25 persen. Sesuai dengan penelitian Paul Harsey dan Kenneth Blanchaer dalam Halim (2007:168). Hal tersebut menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang berada di kawasan non Sarbagita selama periode tahun anggaran 2013-2022 memiliki kemandirian keuangan yang kurang, sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan dibandingkan dengan daerah yang berada pada kawasan Sarbagita. Fenomena tersebut diakibatkan oleh perbedaan PAD yang dihasilkan karena potensi yang dikembangkan oleh masing-masing kabupaten/kota dan tergantung besar wilayahnya. Contohnya Kabupaten Buleleng yang secara geografis merupakan wilayah terluas dan kekayaan alam yang dimiliki lebih banyak dapat menjadi daya tarik wisata dibandingkan dengan Kabupaten Bangli yang memiliki wilayah lebih sempit dan potensi yang minim, sehingga PAD yang dihasilkan paling kecil (Yeimo dan Ayuningsasi, 2022).

Pajak daerah adalah salah satu komponen yang paling tinggi berkontribusi terhadap PAD dan perhitungan perbandingan kontribusi pajak daerah terhadap PAD daerah yang berada di kawasan Sarbagita pada tahun 2013-2022 mencapai angka 40 persen yang disebabkan oleh daerah kawasan Sarbagita cenderung memiliki kekayaan alam dan dapat menyokong bidang pariwisata seperti keberadaan tempat wisata yang indah serta dapat menarik kunjungan wisatawan domestik maupun lokal. Kondisi tersebut bermanfaat karena dapat menggerakkan perekonomian masyarakat Bali. Adanya bidang pariwisata ini dapat memberikan efek yang positif terhadap sektor lainnya, baik dari sektor perdagangan maupun akomodasi serta dengan meningkatnya pendapatan asli daerah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi dan pajak daerah (Ayuningsasi dan Wulandari, 2014). Namun, pajak daerah yang dihasilkan kabupaten/kota di kawasan non Sarbagita seperti di Kabupaten Jembrana, Bangli, dan Buleleng memiliki kontribusi kecil terhadap pendapatan asli daerah. Kecilnya kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di kawasan non Sarbagita disebabkan oleh lemahnya pengawasan

terhadap pemungutan retribusi dan pajak daerah serta potensi masing-masing daerah yang memiliki perbedaan cukup besar (Dewi dan Wardana, 2020).

Pemerintah pusat menjalankan strategi otonomi daerah dengan memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan urusan daerah masing-masing. Pemerintah pusat juga tidak sepenuhnya melepaskan kewajibannya kepada daerah. Penyediaan dana perimbangan, yang dimaksudkan untuk mengurangi kebutuhan pembangunan daerah dan membantu daerah menjadi mandiri dalam menghasilkan pendapatan daerah di masa depan, adalah salah satu metode pemerintah pusat membantu daerah (Nindita dan Rahayu, 2018:14). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mendorong pemerintah daerah untuk mencapai tingkat kemandirian keuangan yang tinggi di daerah agar tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat melalui dana perimbangan berupa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Maka dapat dikatakan bahwa dana perimbangan merupakan salah satu faktor yang akan berdampak terhadap besar kecilnya rasio kemandirian keuangan daerah. Pada umumnya pemerintah daerah dihadapkan dengan fenomena lebih kecilnya kontribusi pendapatan asli daerah dalam APBD dan didominasi oleh besarnya dana transfer pemerintah berupa dana perimbangan.

Tabel 1. PAD dan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	Keterangan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jembrana	PAD	126,48	133,70	148,05	185,00	175,99
		D. Perimbangan	693,20	707,79	631,22	841,86	919,70
2	Tabanan	PAD	363,37	354,56	313,04	362,31	436,41
		D. Perimbangan	1.063,46	1.075,69	1.040,72	1.371,75	1.347,83
3	Badung	PAD	4.555,72	4.835,19	2.116,97	1.750,35	3.705,75
		D. Perimbangan	558,03	568,23	567,55	1.075,22	898,42
4	Gianyar	PAD	770,20	997,48	545,87	430,17	857,55
		D. Perimbangan	928,95	940,14	864,33	1.069,63	1.234,60
5	Klungkung	PAD	186,97	225,06	220,89	254,49	309,46
		D. Perimbangan	669,72	692,59	638,17	853,10	838,35
6	Bangli	PAD	122,69	127,04	104,33	163,54	144,01
		D. Perimbangan	688,03	717,60	655,27	949,35	960,73
7	Karangasem	PAD	200,36	233,01	219,18	252,69	301,33
		D. Perimbangan	937,89	1.011,88	918,02	1.218,93	1.251,26

8	Buleleng	PAD	335,56	365,60	318,99	391,99	410,56
		D. Perimbangan	1.245,13	1.331,02	1.177,66	1.574,99	1.645,52
9	Denpasar	PAD	940,11	1.010,78	731,26	792,36	888,05
		D. Perimbangan	879,46	869,96	828,35	862,74	1.202,73

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

Dalam pelaksanaan otonomi daerah pemerintah memberikan suntikan dana kepada masing-masing daerah berupa dana perimbangan dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah karena memiliki kemampuan keuangan yang berbeda (Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Selain itu, dana perimbangan dimaksudkan untuk menjadi stimulus pembangunan daerah, yang secara progresif akan meningkatkan pendapatan daerah. Artinya, pemberian dana perimbangan dapat dijadikan sebagai pendongkrak perekonomian daerah dan diharapkan dapat meningkatkan komponen-komponen pendapatan asli daerah (Andriana, 2020).

Tabel 1 menunjukkan bahwa dana perimbangan dapat memberikan dampak kepada pemerintah daerah yaitu munculnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat yang dapat dilihat pada realisasi anggaran dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 bahwa sebagian besar porsi PAD pada setiap kabupaten/kota lebih rendah daripada dana perimbangan atau disebut kondisi *flypaper effect* (Pratolo dkk., 2016). Apabila dalam melaksanakan pembangunan daerah selalu bergantung pada transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan, di mana dana perimbangan lebih tinggi dari pada pendapatan asli daerah maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat semakin tinggi hal tersebut mengindikasikan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah semakin rendah. Hal tersebut sejalan dengan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Ardiansyah (2023), Machfud dan Asnawi (2021), serta Heryanti dkk., (2019) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Tingkat kemandirian keuangan daerah juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain, seperti belanja modal. Kelemahan PAD kabupaten/kota di Provinsi Bali yaitu masih mengalami ketimpangan dan belum dapat ditingkatkan agar dapat menutupi belanja daerah, terutama belanja modal akibat tingginya belanja pegawai. Tingginya biaya pegawai dapat berdampak pada total belanja daerah dan dapat membebani stabilitas ekonomi lokal karena penerimaan daerah sebagian besar digunakan untuk membiayai belanja pegawai. Akibatnya, hal ini dapat menghambat laju pembangunan daerah, sehingga tujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah menjadi lebih sulit untuk dicapai. Besarnya persentase anggaran yang dialokasikan untuk belanja pegawai daripada belanja modal memicu tingkat kemandirian keuangan daerah yang rendah (Darwis, 2015). Oleh karena itu, pemerintah

daerah diharapkan dapat lebih berkonsentrasi untuk memanfaatkan semua sumber pendapatan yang tersedia di daerahnya dan berupaya untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk program-program yang bersifat produktif melalui anggaran belanja modal. Hal ini lebih penting daripada permintaan belanja lainnya karena diperlukan untuk pengembangan sektor-sektor penting, sehingga dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah (Pratiwi dkk., 2016).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode asosiatif kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh melalui metode observasi non partisipan pada sembilan kabupaten/kota Provinsi Bali pada periode tahun 2013-2022. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis jalur (*path analysis*) dengan data panel yaitu gabungan antara data *time series* dan *cross sectional* sehingga jumlah pengamatan dalam penelitian yaitu 90 pengamatan.

Penelitian ini menggunakan menggunakan program STATA 17.0 yang berperan sebagai alat dalam menganalisis data dengan persamaan regresi sebagai berikut.

$$1) \text{ Model I, } Y_1 = \beta_1 X_1 - \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_1 \dots \dots \dots (1)$$

$$2) \text{ Model II, } Y_2 = \beta_4 X_1 + \beta_5 X_2 + \beta_6 X_3 + \beta_7 Y_1 + e_2 \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

Y_1 = Kemandirian keuangan daerah

Y_2 = Pertumbuhan ekonomi

X_1 = Pajak daerah

X_2 = Dana perimbangan

X_3 = Belanja modal

$\beta_{1,2,3,4,5,6,7}$ = Koefisien Regresi

$e_{1,2}$ = Kesalahan Residual (*error*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melakukan analisis jalur (*path analysis*), data diregresi dengan menggunakan regresi data panel yaitu gabungan data *time series* dan *cross sectional* sehingga diperoleh dua persamaan dengan model regresi yang terpilih adalah *fixed effect model* (FEM). Tekait dengan hasil analisis regresi kedua persamaan yang terpilih disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi

Model	Variable	Coefficients	Std Error.	T	Sig.	R Square
1	(Constant)	13,64687	2,706827	5,04	0,000	0,8840
	X1	0,0080115	0,001784	4,49	0,000	
	X2	0,0076269	0,0027567	2,77	0,007	
	X3	0,0112426	0,004343	2,59	0,011	
a. Dependent Variable: Y1 (Kemandirian Keuangan Daerah)						
2	(Constant)	5,534953	0,3560041	15,55	0,000	0,7141
	X1	0,000681	0,0002286	2,98	0,004	
	X2	-0,0029294	0,00033	-8,88	0,000	
	X3	0,0067077	0,0005169	12,98	0,000	
	Y1	-0,0521331	0,0129329	-4,03	0,000	
a. Dependent Variable: Y2 (Pertumbuhan Ekonomi)						

Sumber: Data Penelitian, 2024

Pengaruh Langsung Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Hipotesis dalam penelitian ini menduga bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,00 < 0,05$ dan koefisien beta yang positif sebesar 0,0080155. Artinya, apabila pajak daerah meningkat sebesar satu milyar rupiah maka rasio kemandirian keuangan daerah akan meningkat sebesar 0,80155 persen. Hal ini mendukung hipotesis bahwa pajak daerah di kabupaten dan kota di Provinsi Bali memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori Halim (2007: 233), yang mengemukakan bahwa salah satu sumber utama pendapatan asli daerah, yaitu pajak daerah, akan berdampak pada tinggi rendahnya rasio kemandirian keuangan daerah. Pengaruh Langsung Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Hipotesis dalam penelitian menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil pengujian memperoleh *coefficient beta* bernilai positif sebesar 0,0076269 dan memiliki nilai probabilitas sebesar $0,007 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali tiap tahunnya selalu meningkat bahkan melebihi penerimaan pendapatan asli daerahnya. Namun, dengan peningkatan dan besaran dana perimbangan tersebut diikuti dengan peningkatan pendapatan asli daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa transfer pemerintah berupa dana perimbangan yang dialokasikan pusat kepada daerah ditujukan

untuk dapat mendorong perekonomian daerah sehingga dapat menggali potensi sumber daya daerah yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini konsisten dengan dasar pemikiran UU No. 24/2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa pemerintah daerah perlu memiliki sumber pendanaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan layanan publik. Oleh karena itu, alokasi dana perimbangan kepada pemerintah daerah sudah seharusnya digunakan untuk meningkatkan kapasitas dalam menggali dan memperluas sumber pendapatan asli daerah demi mendukung pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Langsung Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Berdasarkan hipotesis penelitian, belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Temuan pengujian menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,011 < 0,05$ dan koefisien beta yang positif sebesar 0,0112426. Artinya, apabila belanja modal meningkat satu milyar rupiah, maka rasio kemandirian keuangan daerah meningkat sebesar 1,12426 persen. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Bali. Berdasarkan hasil pengujian, kemandirian keuangan daerah akan meningkat seiring dengan peningkatan alokasi belanja modal. Temuan penelitian ini konsisten dengan temuan Riyadi (2022) yang menemukan bahwa belanja modal di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa alokasi belanja modal dalam APBD pada hakikatnya bertujuan untuk menambah aset tetap yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah, baik untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan maupun untuk kepentingan pelayanan publik di masing-masing daerah, maka semakin besar belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, maka pemerintah kabupaten/kota akan semakin mencapai kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Langsung Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Menurut hipotesis penelitian, pajak daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif. Temuan pengujian menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,004 < 0,05$ dan nilai koefisien beta yang positif sebesar 0,000681. Artinya, apabila pajak daerah meningkat sebesar satu milyar rupiah, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,00681 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah secara positif dan signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian Dewi dan Budhi (2018), yang menemukan

hubungan positif dan signifikan antara pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengimplikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat sebagai respon dari peningkatan pendapatan asli daerah dalam bentuk pajak daerah. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka perlu adanya peningkatan pajak daerah melalui partisipasi masyarakat yang membayar pajak dan pemerintah daerah yang aktif memungut pajak daerah. Upaya tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, yang kemudian akan digunakan untuk kegiatan produksi dan menghasilkan output berupa barang dan jasa. Pajak daerah menjadi faktor produksi dalam bentuk akumulasi modal, dimana pajak daerah berfungsi sebagai modal dalam melaksanakan pembangunan sehingga dapat merangsang kegiatan ekonomi dan menghasilkan output berupa barang dan jasa dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dengan meningkatnya pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak, maka perekonomian dan pembangunan di suatu daerah dapat berjalan dengan lancar dan mampu mendorong pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya yang ada di suatu daerah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Lianda *et al.*, 2021).

Pengaruh Langsung Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Hipotesis dalam penelitian menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian diperoleh nilai koefisien beta yang bernilai negatif sebesar $-0,0029294$ dan nilai probabilitas sebesar $0,00 < 0,05$. Artinya, apabila dana perimbangan meningkat sebesar satu milyar rupiah, maka pertumbuhan ekonomi menurun sebesar $0,29294$ persen. Hal ini menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Badrudin dan Kuncurojati (2017) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hubungan yang negatif ini disebabkan pada tahun 2020 dan 2021 pemerintah melakukan *refocussing* dan realokasi APBN dan APBD tahun anggaran 2020 untuk penanganan pandemi *Covid-19* yang berdampak besar bagi perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sesuai dengan Instruksi Presiden No. 4 tahun 2020. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/KEMENKES/215/2020 pemanfaatan Dana Alokasi Khusus yang merupakan bagian dana perimbangan difokuskan kepada bidang kesehatan, baik untuk melakukan penambahan program kesehatan ataupun bantuan operasional kesehatan seperti pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien *Covid-19*. Akibat adanya pandemi *Covid-19*

menyebabkan penyerapan dana terhadap belanja daerah, seperti belanja modal berupa pembangunan atau proyek fisik serta belanja lainnya terpaksa dipotong atau digeser (Rizkyana dan Rahayu, 2021).

Pengaruh Langsung Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Berdasarkan hipotesis penelitian, belanja modal diduga memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian menunjukkan koefisien beta yang positif sebesar 0,0067077 dengan nilai probabilitas sebesar $0,00 < 0,05$. Artinya, apabila belanja modal meningkat sebesar satu milyar rupiah, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,67077 persen. Hal ini menegaskan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiraswasta dkk. (2018) yang juga menyimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan dana untuk pembangunan, sehingga membentuk hubungan positif antara belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai parameter untuk mengukur kegiatan pembangunan di dalam sektor-sektor ekonomi suatu negara, sehingga menjadi faktor penting dalam proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi.

Pengaruh Langsung Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Hipotesis dalam penelitian menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian memperoleh *coefficient beta* bernilai negatif sebesar -0,0521331 dan memiliki nilai probabilitas sebesar $0,00 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali. Hubungan negatif dan signifikan antara kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi karena tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota di Provinsi Bali rata-rata masih termasuk ke dalam pola instruktif (Kabupaten Jembrana, Tabanan, Klungkung, Karangasem, Buleleng, dan Bangli) dengan kategori kemampuan keuangan yang rendah sekali yaitu dengan kisaran interval 0-25 persen. Pola Instruktif ini memiliki arti bahwa peranan pemerintah pusat cenderung lebih mendominasi dari pada pemerintah daerah atau daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial. Di sisi lain, hanya Kabupaten Badung yang menunjukkan pola hubungan delegatif dan kemampuan keuangan yang tinggi, yang mengindikasikan minimnya campur tangan

pemerintah pusat karena otonomi daerah yang murni. Sebaliknya, Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar menunjukkan pola hubungan konsultatif dengan kemampuan keuangan yang moderat, yang mengindikasikan berkurangnya campur tangan pemerintah pusat dengan tetap memberikan konsultasi dan menunjukkan pengelolaan otonomi daerah yang semakin meningkat (Halim, 2007: 168). Oleh sebab itu, kemandirian keuangan daerah memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena rendahnya kemampuan keuangan dan pola hubungan yang instruktif di sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Bali. Selain itu, Provinsi Bali saat ini masih bergantung pada sektor pariwisata, ketika ada gangguan seperti pandemi *Covid-19* pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali terganggu, di mana pada tahun 2020 dan 2021 pertumbuhan ekonomi berada pada tren negatif sehingga adanya penurunan pendapatan asli daerah. Penurunan PAD yang berhubungan dengan rasio kemandirian keuangan daerah yang rendah disebabkan karena pada tahun tersebut wisatawan domestik atau lokal cenderung tidak melakukan kegiatan pariwisata karena adanya kebijakan PSBB sehingga berkontraksinya produktivitas pekerja yang berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Tidak Langsung Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Hasil analisis data menunjukkan bahwa pajak daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung melalui kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini mengimplikasikan bahwa kemandirian keuangan daerah berperan sebagai variabel intervening dalam hubungan tidak langsung antara pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tersebut. Pajak daerah merupakan bagian yang signifikan dari pendapatan daerah dan merupakan komponen yang sangat penting secara keseluruhan. Oleh karena itu, penerimaan pajak daerah yang lebih tinggi akan meningkatkan pendapatan daerah, yang kemudian meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di seluruh daerah. Pajak daerah berperan sebagai faktor produksi dengan memfasilitasi akumulasi modal, di mana pajak daerah berfungsi seperti halnya modal dalam mendorong kegiatan pembangunan, menstimulasi kegiatan ekonomi, dan menghasilkan output berupa barang dan jasa, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, peningkatan pendapatan daerah, terutama dari perpajakan, mendorong kelancaran operasi ekonomi dan mendukung pengembangan sektor swasta dan rumah tangga dalam alokasi sumber daya di wilayah tersebut, yang selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Lianda *et al.*, 2021).

Pengaruh Tidak Langsung Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Hasil analisis data menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali. Artinya, variabel kemandirian keuangan daerah merupakan variabel *intervening* pada pengaruh tidak langsung dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Dana perimbangan merupakan salah satu instrumen pemerintah pusat dalam membantu pemerintah daerah melaksanakan otonomi daerah yang dijadikan sebagai pendongkrak perekonomian daerah dengan harapan dapat meningkatkan penerimaan daerah. Selain itu, adanya transfer pemerintah berupa dana perimbangan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah dengan mengalirkan dana ke daerah-daerah yang kurang berkembang untuk membantu daerah-daerah mengejar ketertinggalan dalam pembangunan, sehingga dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih merata dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Pengaruh Tidak Langsung Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Hasil analisis data menunjukkan bahwa belanja modal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung melalui kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini mengimplikasikan bahwa kemandirian keuangan daerah berperan sebagai variabel *intervening* dalam hubungan tidak langsung antara belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tersebut. Belanja modal merupakan salah satu jenis belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelayanan publik yang bertujuan untuk membangun sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi belanja modal dalam APBD terutama ditujukan untuk meningkatkan aset tetap dalam rangka pembangunan infrastruktur, mendukung tugas-tugas pemerintahan, dan meningkatkan pelayanan publik di seluruh daerah. Ketika pemerintah daerah memberikan layanan publik yang berkualitas tinggi dan mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, maka hal ini akan berkorelasi dengan peningkatan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, peningkatan belanja modal akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah, yang kemudian akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung dengan memfasilitasi peningkatan infrastruktur dan layanan publik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka ditarik simpulan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut.

- 1) Pajak daerah, dana perimbangan, dan belanja modal secara langsung berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali.
- 2) Pajak daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan kemandirian keuangan daerah secara langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali.
- 3) Pajak daerah, dana perimbangan, dan belanja modal berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota di Provinsi Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, N. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(2), hal. 105-113.
- Ardiansyah, R. (2023). Determinan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen dan Profesional*, 4(1), hal. 92-106.
- Arpani, W. N., & Halmawati, H. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2373-2390.
- Ayuningsasi, A. A. K., & Wulandari, P. P. (2014). Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3(11), hal. 530-549.
- Badrudin, R., & Kuncorojati, I. (2017). The Effect Of District Own-Source Revenue And Balance Funds On Public Welfare By Capital Expenditure And Economic Growth As An Intervening Variable In Special District Of Yogyakarta. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 19(1), pp. 54-59.
- Darwis, E. T. R. (2015). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), hal. 1-23.
- Dewi, H., & Wardana, G. U. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Langsung serta Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Journal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 11(2), hal. 749-777.

- Dewi, J. K., & Budhi, M. K. S. (2018). Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 7(6), hal. 1695-1722.
- Dewi, P. A. K., & Sutrisna, I. K. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(1), hal. 32-40.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Heryanti, C. D., Wahidahwati, W., & Suryono, B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 3(1).
- Lianda, P. Y., Priantana, R. D., & Aswadi, K. (2021). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(3), hal. 153-159.
- Machfud, M., & Asnawi, A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 5(1), hal. 14-31.
- Nindita, N. L., & Rahayu, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 2(1), hal. 12-19.
- Pratiwi, A., Nurlaela, S., & Chosatu, Y. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta. *Paradigma*, 19(2), hal. 105-112.
- Pratolo, S., Yaya, R., Sofyani, H. (2016). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (Konsep dan Implementasi-Untuk Akademisi dan Praktisi)*. Yogyakarta: LP3M-UMY.
- Riyadi, W. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 3(1), hal. 298-314.
- Rizkyana, T., & Rahayu, S. (2021). Pengaruh Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah di Masa Pandemi Covid-19 (studi

Empiris Pada Provinsi di Indonesia Tahun 2020). *eProceedings of Management*, 8(6), hal. 8435-8441.

Wiraswasta, F., Pudjihardjo, M., & Adis, P. M. (2018). Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal di Kota Dalam Wilayah Jawa Timur (Tahun 2009-2014). *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(2), hal. 170-180.